



Mengantisipasi Penolakan Vaksin

■ Pemkot Siapkan Sanksi Berbeda untuk Pedagang

Ya, ini kan sedang kita bahas yang tidak ikut vaksinasi itu, kalau mau berdagang setiap tiga hari sekali harus swab antigen.

Heroe Poerwadi

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta siap memulai proses vaksinasi Covid-19 tahap kedua per 1 Maret mendatang. Para pedagang dan pelaku wisata di Malioboro, serta Pasar Beringharjo jadi sasaran pertama. Bagi mereka yang menolak imunisasi, ada konsekuensi tertentu.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi berujar, sesuai informasi dari komunitas pedagang kaki lima (PKL) serta pedagang pasar, masih dijumpai penolakan vaksinasi di lapangan. Karena itu, pihaknya pun menyiapkan sanksi, terhadap mereka yang tak berse-

dia diinjeksi vaksin.

Namun, meski Presiden Jokowi sudah meneken Perpres No.14 Tahun 2021, yang memuat sanksi administratif, maupun hukum pidana bagi orang yang menolak, Pemkot memilih untuk menerapkan sanksi yang sedikit beda.

"Ya, ini kan sedang kita bahas yang tidak ikut vaksinasi itu, kalau mau berdagang setiap tiga hari sekali harus *swab antigen* secara mandiri," jelasnya, Senin (22/2).

Menurut Heroe, sanksi tersebut diterapkan untuk mendorong supaya pedagang bersedia divaksin,

● ke halaman 11

Mengantisipasi

● Sambungan Hal 1

mengingat imunisasi adalah demi kebaikan bersama. Terlebih, vaksin Covid-19 sejauh ini sudah terbukti aman ketika diinjeksi ke para paramedis, sehingga pedagang tak perlu khawatir.

"Ya, itu (sanksinya). Jika tidak mau vaksinasi, kalau dia mau jualan, setiap tiga hari sekali wajib menunjukkan hasil *swab antigen*. Semoga tidak ada penolakan," terangnya.

Wakil Wali Kota Yogyakarta itu mengatakan, berdasarkan data, terdapat lebih kurang 20 ribu pelaku wisata yang mendapat jatah vaksinasi di sepanjang Malioboro. Yakni meliputi, 8.141 pedagang di Pasar Beringharjo, 2.600 PKL, 9.300 karyawan toko, maupun hotel, sampai petugas keamanan.

"Kita dorong secepatnya (mendaftar), karena harapan kami setelah nakes selesai, langsung masuk ke pelayanan publik. Nanti akan ada undangannya dari dinas kesehatan, untuk pelaksanaannya lewat ketua komunitas," kata Heroe.

"Yang tidak registrasi, tidak bisa ikut vaksin. Jadi,

ini supaya masyarakat juga tahu, orang tidak bisa di-vaksin, kalau belum dapat undangan dari penyelenggara. Sekarang tambahan vaksinnya itu sudah sampai di DIY," imbuh dia.

Dari sekitar 20 ribu pelaku wisata yang sudah terdata, belum semuanya melakukan registrasi. Ia mengakui, tingkat pemahaman terhadap teknologi informasi menjadi kendala, lantaran pendaftarannya secara daring.

"Pelakunya ini kan dari berbagai macam kelompok. Memang, ada yang sudah terbiasa dengan *gadget*, tapi tidak sedikit yang belum terbiasa," jelasnya.

Lebih lanjut, Heroe juga memaparkan, sampai kemarin nakes yang telah menjalani injeksi pertama vaksin menyentuh 94,6 persen dan 69,9 persen untuk penyuntikan dosis yang kedua. Ia optimis, proses imunisasi bagi para pejuang Covid-19 di garda terdepan tersebut, bisa selesai tepat waktu.

"Jadi, ya harapan kami, akhir bulan ini selesai bisa terealisasi. Sehingga, kita bisa fokus ke tahapan berikutnya, menyasar aparat pelayanan publik, pedagang pasar dan PKL, serta pelaku

pariwisata," pungkas Heroe.

Dukungan

Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima Malioboro-Ahmad Yani (Pamalni), Slamet Santoso menyampaikan, sampai saat ini pihaknya memang belum mendapat sosialisasi mengenai wacana vaksinasi. Tapi, demi kebaikan bersama, paguyuban pun mempersilakan pemerintah menerapkannya.

"Pamalni mendukung adanya sanksi. Proses vaksin ini kan kewajiban kita bersama, sehingga saya kira sangat penting. Kita sudah sosialisasikan ke anggota, ya, vaksinasi ini demi kesehatan kita juga," terangnya, Senin (22/2).

Ia mengungkapkan, dari Pelmani terdapat lebih kurang 440 pedagang yang terdata untuk mengikuti proses vaksinasi ini, yang dilakukan sejak pekan lalu. Dari jumlah itu, mereka yang menolak vaksin hanya sebagian kecil saja.

"Ada satu, atau dua yang menolak. Tapi, sudah kami berikan pemahaman. Saya kumpulkan pengurus-pengurusnya, untuk ikut menyosialisasikan ke anggota. Nah, setelah itu paham, mereka akhirnya bersedia divaksin," ungkapnya.

Koordinator Paguyuban Pedagang Pasar Beringharjo Barat, Bintoro pun mempersilakan Pemkot Yogyakarta menerapkan sanksi terhadap mereka yang menolak vaksin. Terlebih, saat ini, di lapangan masih dijumpai pedagang-pedagang yang belum bersedia diinjeksi vaksin dari Sinovac itu.

"Kalau itu kebijakan dari Pak Wawali, ya, *monggo*, karena kita juga sudah memberikan informasi yang baik dan benar pada seluruh pedagang. Tapi, setiap orang punya pemikirannya sendiri-sendiri. Jadi, itu hak Pemkot untuk memberikan tekanan, ya, kepada para pedagang," tandasnya.

Akan tetapi, ia mengakui, rata-rata pedagang yang menolak vaksin disebabkan oleh kekhawatiran, lantaran mempunyai penyakit bawaan atau *komorbid*. Bintoro pun menjelaskan, bahwa kewenangan paguyuban sebatas mendata saja, sementara keputusan divaksin atau tidaknya ada di dinkes. "Jadi, bukan serta merta nggak mau divaksin, ya, cuma khawatir saja karena ada penyakit bawaan, seperti hipertensi, jantung, maupun diabetes melitus," pungkasnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Maret 2021
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005